



**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
TAHUN 2024**



**DINAS PERTANIAN
KOTA DENPASAR**

KATA PENGANTAR



Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan risiko Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis dan sasaran operasional organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan..

Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan pelaksanaan pengelolaan risiko di Dinas Pertanian Kota Denpasar pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya dokumen / laporan pelaksanaan pengelolaan risiko Dinas Pertanian Tahun 2024, kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008



ꦏꦺꦥꦶꦏꦺꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦥꦱꦂ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦂꦠꦤꦶꦤ
DINAS PERTANIAN

ꦗꦭ. ꦲꦩꦢ ꦚꦤꦶ ꦤꦺ. 112 ꦢꦺꦤꦥꦱꦂ ꦠꦺꦭꦺꦤ (0361) 422224, ꦑꦶꦲ (0361) 428410
Email: distankotadenpasar@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu: 1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan; 2. keandalan pelaporan keuangan; 3. pengamanan aset negara; dan 4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Pertanian Kota Denpasar menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pasal 8 ayat (2) dimana Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama juga sebagai penanggung jawab pengelola risiko, maka setiap Perangkat daerah Wajib melaksanakan pengelolaan risiko yang dilakukan pelaporan setiap tiga bulan (triwulan).

Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2024 dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2024.

BAB II

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

1) **Penetapan konteks strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar mengacu pada:**

1. Misi ke 2 (dua) yaitu Menjaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.

Pada Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Denpasar menetapkan 1 (satu) terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu ;

- a. Tujuan strategis Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani; sasaran strategis 2 (dua) yaitu 1. Meningkatnya Pendapatan Petani dan 2. Meningkatnya Pendapatan Peternak; dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Strategis ada 3 (tiga) yaitu (1) Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, (2) Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak, (3) Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok); dan program / kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **lampiran 1 (form 2.b.1 MR OPD)**.

2) **Penetapan konteks operasional Dinas Pertanian Kota Denpasar mengacu pada :**

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan keluaran/hasil kegiatan persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan keluaran/Hasil

Kegiatan Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.

c. Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran/Hasil Kegiatan Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.

d. Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.

e. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan keluaran/hasil kegiatan Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.

f. Program : penyuluhan pertanian, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Keluaran/Hasil Kegiatan Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2 (Form 2.c.1 MR OPD)**.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Dinas Pertanian Kota Denpasar memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam **lampiran 3 (form 3.b dan 3.c MR OPD 2024)**.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 18 (delapanbelas) risiko dari populasi.

Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (*controllable*) sebanyak 14 (empatbelas) buah dari total risiko strategis Dinas Pertanian dan jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) sebanyak 4 (empat) buah dari total risiko strategis Dinas Pertanian.

C. Hasil Analisis Risiko

Dari 8 (delapan) risiko (**form 4**) yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko (0% dari 8 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 4 (form 5 MR OPD 2024)**.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* sebanyak 8 (delapan) risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada **Lampiran 5 (Form 7 MR OPD 2024)**

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Sebanyak 8 (lima) risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 8 (delapan) risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6 (form 7 MR OPD 2024)**.

BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Sebanyak 2 (dua) risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 8 (delapan) risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada **lampiran 7 (Form 8 MR OPD 2024)**.

BAB IV

Rancangan Pemantauan

Dari 8 (delapan) kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam **lampiran 8 (Form 9 MR OPD 2024)**

Dempasar, 3 Januari 2020

Kepala Dinas Perikanan

KJG P.001/2020

[Signature]

Kedua, dan Pihak Lain yang Berkepentingan

2020

2020

BAB V

Penutup

Evaluasi dilakukan terhadap identifikasi jenis risiko yang muncul pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang dibangun oleh manajemen Dinas Pertanian Kota Denpasar termasuk penetapan tingkat risiko, penyebab dan rencana tindak lanjut yang ditetapkan, dengan hasil risiko paling hakiki. Pada Tahun 2023 tidak ada risiko yang terjadi atas program dan kegiatan. Kedepannya untuk terus meminimalisir terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya risiko yang mungkin terjadi, Rencana Tindak pengendalian (RTP) akan lebih ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,



 Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

Nama Pendaftar: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
 Nama OPD: Dinas Pertanian
 Tahun Penyusunan: 2024
 Periode Rencana Kerja: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024
 Tahun Anggaran: Mengembangkan Kelembagaan Pertanian
 Uraian Program: Uraian Program (Bidang Pertanian)

No	Tipe/Strategi	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Pembahasan	Uraian	Sasaran	Sasaran	CUC	Kerangka	Pihak yang Terlibat	Aksi/Target	Skala	Skala	Skala	Rincian Anggaran	Peningkat
				Kode Risiko	Pertemuan													
1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan Produktivitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani	Berhasil Cuci (BC) ratio perolehan dan biaya berproduksi per hektar	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	RISD 24.27.27.01	Kepala Dinas	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	UC	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	3	2	6	1.900.000.000	1.900.000.000
2	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Perentase Pemasaran Produk yang berproduksi per hektar	Masih terdapat kendala pemasaran per hektar yang kurang baik	RISD 24.27.27.10	Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	1. Kondisi / kondisi cuaca yang tidak ideal 2. Biaya 3. Keterbatasan 4. Sarana OPT	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	UC	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	3	2	6	1.100.000.000	1.100.000.000
3	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Perentase Sarana Pertanian (OPT) di Bidang Sarana Prasarana	Terdapat kendala sarana pertanian	RISD 24.27.27.18	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	1. Kondisi / kondisi cuaca yang tidak ideal 2. Biaya 3. Keterbatasan 4. Sarana OPT	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	UC	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	2	2	4	440.415.000	440.415.000
4	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Perentase Pengabdian Masyarakat (PM) di Bidang Sarana Prasarana	Jumlah kelompok tani yang mendapat pengabdian per hektar per hektar	RISD 24.27.27.02	Kepala Dinas	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	UC	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	2	2	4	1.410.100.000	1.410.100.000
1	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura per hektar	Terdapat kendala sarana pertanian	RISD 24.27.27.07	Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Ketersediaan Hewan	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	C	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	2	2	4	200.000.000	200.000.000
2	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Perentase Peningkatan Hasil Produksi per hektar	Terdapat kendala sarana pertanian	RISD 24.27.27.12	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Ketersediaan Hewan - UPTD RPH	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	UC	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	3	2	6	400.000.000	400.000.000
3	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah RPH yang terdapat per hektar	Terdapat kendala sarana pertanian	RISD 24.27.27.10	Kepala UPTD RPH	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	C	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1	1	1	700.000.000	700.000.000
3	Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat	Perentase Peningkatan Jumlah RPH yang terdapat per hektar	Terdapat kendala sarana pertanian	RISD 24.27.27.01	Sekretariat Dinas	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Kualitas hasil yang tinggi 2. Jumlah hasil yang stabil 3. Jumlah pupuk yang stabil 4. Ketersediaan air dalam pengisian yang baik	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	Internal	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1. Berencana Nama perolehan per hektar 2. Fasilitas harga tinggi	1	1	1	140.000.000	140.000.000

Dipaparkan 12 Januari 2024
 Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Identifikasi Risiko Operasional OPD

Form 3.c

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Nama OPD	: Dinas Pertanian	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021 - 2026	
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Ketahanan Pangan	
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Meningkatkan pendapatan peternak	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Risiko		Penyakit	Uraian	Sumber	CUC	Dampak	
					Kode Risiko						Uraian	Pihak yang Terkena
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan Produksi Temak		Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.24.27.27.07	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian	1. Kualitas benih yang kurang baik 2. Jumlah benih yang tidak sesuai dengan kebutuhan 3. Jumlah pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 4. Ketersediaan air dalam pengairan yang tidak kontinyu	Internal	C	Tidak tercapai target Produktivitas Tanaman Padi dan Hortikultura serta produksi temak	Masyarakat / Petani	
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pelaksanaan	- Demplot / pengembangan komoditas tanaman pangan & hortikultura tidak berjalan sesuai dengan juknis/SOP - Traktor yang dipesan bisa tidak sesuai spek teknis dan komposisi Pupuk yang dipesan bisa tidak sesuai dengan standar	ROO.24.27.27.08	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian	- Keterbatasan pengetahuan SDM Petani dalam budidaya komoditas tanaman pangan varietas baru serta hortikultura khususnya cabai dan kubis masih belum optimal - Keterbatasan pembiayaan saprodi untuk pengembangan komoditas tanaman pangan & hortikultura	Internal	C	- Petani tidak terampil dalam budidaya komoditas tanaman pangan dan hortikultura	Masyarakat / Petani	
			Penatausahaan	Anggaran yang disediakan untuk kegiatan demplot & pengembangan/luasasan tidak terserap sesuai rencana awal yang telah disusun		- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian	Anggaran yang disediakan untuk kegiatan demplot & pengembangan/luasasan sudah direncanakan pada tahun sebelumnya	Internal	C	Saprodi dan pelaksanaan demplot, pengembangan/luasasan tidak berjalan	Masyarakat / Petani	
			Pertanggungjawaban	SPJ tidak terealisasi tepat waktu sesuai termin yang telah ditetapkan diawal		- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian	SPJ yang harus terealisasi tepat waktu sesuai termin yang sudah ditetapkan diawal	Internal	C	Realisasi SPJ terlambat	Masyarakat / Petani	

			Pelaporan	Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian tidak sesuai dengan juknis kegiatan				- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian	Laporan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian harus dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan	Internal	C	Kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Masyarakat / Petani
2.	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi temak	Pelaksanaan	- terjadinya kecelakaan kerja saat menangani temak	ROO 24 27 27 09		- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kepala UPTD Puskesmas	- ternak susah ditangani - kurang terampilnya petugas dalam menangani kegiatan	Eksternal	UC	- tidak dapat mencapai target peningkatan populasi temak	- Petugas Masyarakat / Petani	
			Penatausahaan	- Kesalahan dalam penyajian angka			- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kepala UPTD	- petugas kurang teliti dalam administrasi - terdapat prosedur/aturan yang berubah	Internal	C	- kegiatan terhambat	- Dinas Pertanian	
			Pertanggungjawab awaban	- penyerahan berkas pertanggungjawababan terhambat			- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kepala UPTD	- petugas kurang teliti dan kurang memahami prosedur / petunjuk teknis	Internal	C	- laporan pertanggungjawababan terhambat	- Dinas Pertanian	
			Pelaporan	- penyampaian laporan fisik/keuangan tidak tepat waktu			- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kepala UPTD	- petugas kurang teliti dan kurang memahami prosedur / petunjuk teknis	Internal	C	- angka laporan realisasi tidak sama dengan aplikasi SIPD	- Dinas Pertanian	
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik		Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO 24 27 27 10		- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	Tingginya biaya pemeliharaan dan pembangunan prasarana pertanian	Internal	C	Aksesibilitas bentanl masih kurang optimal sehingga pendapatan petani rendah akibat biaya produksi cenderung lebih tinggi	Masyarakat / Petani	
1.	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	Pelaksanaan	1. Spek prasarana tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 2. Pelayanan kurang optimal	ROO 24 27 27 11		- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	Kualitas SDM tidak optimal	Internal	C	Kinerja dinas kurang optimal	- Dinas Pertanian	
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu			- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	Kualitas SDM tidak optimal	Internal	C	Kinerja dinas kurang optimal	- Dinas Pertanian	
			Pertanggungjawab awaban	Pertanggungjawababan tidak tepat waktu			- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	Kualitas SDM tidak optimal	Internal	C	Temuan pememksaan	- Dinas Pertanian	
			Pelaporan	1. Tidak balanced 2. Dalam pelaporan sering terjadi gangguan pada sistem (e-retribusi)			- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD RPH	Kualitas SDM tidak optimal	Internal	C		- Dinas Pertanian	

III.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis		Terancamnya Budidaya peternakan beserta produknya	ROO.24.27.27.12	-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	1. Keterbatasan lahan 2. Keterbatasan Sarana Prasarana Peternakan (Sapronak) 3 Keterbatasan Sumber daya manusia 4. Ketersediaan benih ternak yang terjangkau terbatas	Eksternal	UC	Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat veteriner	Masyarakat / Petani
1.	Kegiatan : penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pelaksanaan	- terdapat populasi hewan / ternak yang belum tervaksin - petugas vaksinasi tergigit hewan pembawa rabies	ROO.24.27.27.13	-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	- kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan vaksinasi dan pendataan temak/hewan - hewan pembawa rabies tidak bisa terdeteksi secara kasat mata	Eksternal	UC	- meningkatkan kasus penyakit hewan menular strategis - kesehatan masyarakat menurun	petugas pelayanan kesehatan
			Penaltesusahaan	- kesalahan dalam penyajian angka		-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	1. Adanya aturan/regulasi yang harus diikuti 2. Ketersediaan obat di pasaran terbatas	Internal	C	terganggunya pelayanan karena petugas membutuhkan waktu untuk	masyarakat /peternak
			Pelaporan	- penyampaian laporan fisik/keuangan tidak tepat waktu		-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	Proses pengadaan terhambat karena mengikuti aturan/regulasi	Internal	C	1. Data Pelaksanaan Kegiatan tidak valid 2. Terjadi Kesalahan dalam pengambilan	Dinas
2.	Kegiatan : pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Persentase produk Aman Sehat Ujuh Halal (ASUH)	Pelaksanaan	- terdapat pelaku usaha terutama pedagang daging yang tidak kooperatif	ROO.24.27.27.14	- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	- kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang produk pangan a saI hewan yang Aman Sehat Ujuh Halal (ASUH)	Internal	C	- menurunnya kualitas penjaminan produk asal hewan yang Aman Sehat Ujuh Halal (ASUH)	-Petugas Masyarakat /Petani
			Penaltesusahaan	- kesalahan dalam penyajian angka		-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	- petugas kurang teliti dalam administrasi -terdapat prosedur/aturan yang berubah	Internal		- kegiatan terhambat	-Dinas Pertanian
			Pertanggungjawaban	- penyerahan berkas pertanggungjawaban terlambat		-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	-petugas kurang teliti dan kurang memahami prosedur / petunjuk teknis	Internal		- laporan pertanggungjawaban terhambat	-Dinas Pertanian
			Pelaporan	- Penyampaian laporan fisik/keuangan tidak tepat waktu		-Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan -Kepala UPTD Puskesmas	- angka laporan realisasi tidak sama dengan aplikasi SIPD	Internal		- Dinas Pertanian	-Dinas Pertanian
3.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/kota	Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelaksanaan	Kejadian tidak terduga (tertusuk jarum, digigit hewan, diseruduk/dite ndang temak)	ROO.24.27.27.15	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Hewan/Ternak susah dikendalikan	Eksternal	UC	terganggunya pelayanan karena petugas membutuhkan waktu untuk pemulihan	petugas pelayanan kesehatan

VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Penatausahaan	- Penyesuaian aliran kas dengan pelaksanaan kegiatan	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aliran kas karena perubahan jadwal oleh KWT.	internal	C	pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aliran kas karena perubahan jadwal oleh KWT.	Kelompok Tani
			Pertanggungjawaban	- penyerahan berkas pertanggungjawaban terlambat	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	Pencairan anggaran dilakukan sesuai bulan pelaksanaan kegiatan	internal	C	Pencairan anggaran dilakukan sesuai bulan pelaksanaan kegiatan	Kelompok Tani
			Pelaporan	Laporan realisasi Anggaran mundur dari jadwal aliran kas	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	Laporan realisasi Anggaran mundur dan jadwal aliran kas karena mengikuti realisasi fisik kegiatan.	internal	C	Laporan realisasi Anggaran mundur dari jadwal aliran kas karena mengikuti	Kelompok Tani
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kesalahan dalam membuat daftar penerimaan gaji ASN	Sekretariat Dinas	Terjadi pengurangan volume pengadaan penunjang urusan kantor (barang tidak sesuai dengan nota pesanan)	internal	C	Operasional kantor terganggu	Sekretariat Dinas Pertanian
			Penatausahaan	Kekurangan alokasi anggaran pada aliran kas	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Pembayaran gaji ASN terlambat	ASN Dinas Pertanian
			Pertanggungjawaban	SPJ terlambat	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Pembayaran gaji ASN terlambat	ASN Dinas Pertanian
			Pelaporan	Tidak balanced	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Temuan pemeriksaan	Dinas Pertanian
			Pelaksanaan	Pemenuhan fasilitas administrasi dinas tidak sesuai	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Pemenuhan fasilitas administrasi dinas terlambat / terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Penatausahaan	Kekurangan alokasi anggaran pada aliran kas	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Pemenuhan fasilitas administrasi dinas terlambat / terganggu	ASN Dinas Pertanian
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi	Pertanggungjawaban	SPJ terlambat	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Pemenuhan fasilitas administrasi dinas terlambat / terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pelaporan	Tidak balanced	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Temuan pemerksaan	Dinas Pertanian
			Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dinas tidak terpenuhi	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Kenyamanan kerja pegawai terganggu	ASN Dinas Pertanian
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dinas tidak terpenuhi	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Kenyamanan kerja pegawai terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dinas tidak terpenuhi	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	internal	C	Kenyamanan kerja pegawai terganggu	ASN Dinas Pertanian

			Penatausahaan	Kekurangan alokasi anggaran pada aliran kas		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pemenuhan kebutuhan barang dalam pelayanan terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pertanggungj awaban	SPJ terlambat		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pemenuhan kebutuhan barang dalam pelayanan terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pelaporan	Tidak balanced		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Temuan pemeriksaan	Dinas Pertanian
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Pelaksanaan	Kesalahan dalam membuat daftar penerimaan gaji Non ASN	ROO 24 27 27 05	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pembayaran gaji Non ASN terlambat	Pegawai Non ASN Dinas Pertanian
			Penatausahaan	Kekurangan alokasi anggaran pada aliran kas		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pembayaran gaji Non ASN terlambat	Pegawai Non ASN Dinas Pertanian
			Pertanggungj awaban	SPJ terlambat		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pembayaran gaji Non ASN terlambat	Pegawai Non ASN Dinas Pertanian
			Pelaporan	Tidak balanced		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Temuan pemeriksaan	Dinas Pertanian
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya fasilitas sarana pendukung kantor	ROO 24 27 27 06	Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Proses kerja dan pelayanan terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Penatausahaan	Kekurangan alokasi anggaran pada aliran kas		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Pemeliharaan sarana pendukung kantor untuk pelayanan terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pertanggungj awaban	SPJ terlambat		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Kinerja Dinas terganggu	ASN Dinas Pertanian
			Pelaporan	Tidak balanced		Sekretariat Dinas	SDM kurang cermat dan terampil	Internal	C	Temuan pemeriksaan	Dinas Pertanian



 Denpasar, 12 Januari 2024
 Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
 Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196608031992031008

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis		Meningkatkan Ketahanan Pangan					
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintah Bidang Pertanian					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
1.	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	RSO.24.27.27.01	1. Pendampingan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian. 2. Pendampingan bencana pertanian	1. Identifikasi sumber-sumber air 2. Identifikasi benih unggul terbaru	Penyediaan sarana prasarana pertanian unggul terbaru dan tepat guna	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tahun 2024
2.	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	RSO.24.27.27.02	1. Pendampingan kesehatan ternak / hewan 2. Upaya peningkatan produktifitas ternak	Identifikasi benih ternak unggul	Penyediaan bibit ternak unggul	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tahun 2024
III Risiko Operasional OPD							
1.	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.24.27.27.07	Percontohan / kajian / demplot untuk mencari varietas-varietas unggul terbaru	1. Identifikasi penggunaan varietas / benih baru / unggul 2. Identifikasi penggunaan pupuk unggul	1. Penyediaan varietas benih komoditi unggul terbaru 2. Penganggaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 3. Penyediaan pupuk non subsidi yang berkualitas	- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Tahun 2024
2.	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO.24.27.27.10	Fasilitasi penyediaan prasarana pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Usaha Tani (JIUT) dan Rumah Potong Hewan (RPH)	Identifikasi prasarana pertanian berkeondisi rusak	1. Penyuluhan kepada petani pentingnya turut memelihara prasarana pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi ketersediaan prasarana pertanian baik / rusak	- Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan - Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	Tahun 2024
3.	Terancamnya Budidaya peternakan beserta produknya	ROO.24.27.27.12	1. Penyuluhan ttg kesehatan hewan 2. Penerapan biosecurity (spraying disinfektan, pembatasan lalulintas hewan dan manusia) 3. Vaksinasi 4. Pakan bergizi	Identifikasi penggunaan teknologi terbaru	1. Pemenuhan sapronak 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	- Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan - Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan - Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	Tahun 2024
4.	Terjadinya bencana pertanian	ROO.24.27.27.16	Pembasmian / penyemprotan hama penyakit tanaman	Identifikasi bencana pertanian yang mungkin terjadi	Memberikan penyuluhan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi terutama pada musim cuaca kurang baik	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tahun 2024
5.	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian belum optimal sesuai target	ROO.24.27.27.18	1. Adanya petugas penyuluh lapangan 2. Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian di 4 kecamatan	Peningkatan intensitas pendampingan penyuluhan	Penyuluhan / pertemuan petugas lapangan dengan petani / kelompok tani	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	Tahun 2024
6.	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	ROO.24.27.27.01	Control / pengawasan berjenjang dari bawah sampai top manager	Pengawasan melekat	Atas pemenuhan segala kebutuhan penunjang urusan kantor akan selalu menjadi prioritas yang diutamakan	Sekretariat Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tahun 2024

Denpasar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar


Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Ketahanan Pangan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Bidang Pertanian						
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
1							
2							
II Risiko Strategis							
Dinas Pertanian Kota Denpasar							
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
III Risiko Operasional							
Dinas Pertanian Kota Denpasar							
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
3	Terancamnya Budidaya peternakan beserta produknya	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
4	Terjadinya bencana pertanian	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
5	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian belum optimal	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Tahun 2024	Tahun 2024	
6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	

Denpasar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008



RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Ketahanan Pangan					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah Bidang Pertanian					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Identifikasi penggunaan varietas / benih baru / unggul 2. Identifikasi penggunaan pupuk unggul	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	
2	Identifikasi prasarana pertanian berkondisi rusak	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	
3	Identifikasi penggunaan teknologi terbaru	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	
4	Identifikasi bencana pertanian yang mungkin terjadi	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	
5	Peningkatan intensitas pendampingan penyuluhan	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	
6	Pengawasan melekat	1. Aturan/Kebijakan	Dinas Pertanian	Tahun 2024	Tahun 2024	

Denpasar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar


Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Ketahanan Pangan								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintah Bidang Pertanian								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I Risiko Strategis Pemda										
1	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis OPD										
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	RSO.24.27.27.01	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	RSO.24.27.27.02	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
III Risiko Operasional OPD										
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.24.27.27.07	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO.24.27.27.10	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
3	Terancamnya Budidaya peternakan beserta produknya	ROO.24.27.27.12	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
4	Terjadinya bencana pertanian	ROO.24.27.27.16	23 desember 2024	Curah hujan tinggi	Tanaman padi terendam air / banjir mengakibatkan gagal panen 7,25 ha	Tahun 2024 sudah dianggarkan asuransi usaha tani padi sebesar 2.000 ha	Melaksanakan klaim asuransi usaha tani padi untuk menekan kerugian petani	Tahun 2024	Bulan Desember Tahun 2024	
5	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian belum optimal	ROO.24.27.27.18	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		
6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	ROO.24.27.27.01	Tidak ada	-	-	Tidak ada kejadian risiko	-	Tahun 2024		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi


Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar

 Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008